

**KATALOG BPS: 9302004.3573**

# **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PENGUNAAN KOTA MALANG**

**2010 - 2014**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA MALANG**

## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir, yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Malang, Desember 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
Kota Malang,



MOHAMAD SARJAN

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Grafik .....	vii
Daftar Lampiran .....	viii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1.  Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	2
1.2.  Kegunaan Statistik PDRB .....	3
BAB II    METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA .....	5
2.1  Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	6
2.2  Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT .....	9
2.3  Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah .....	12
2.4  Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	15
2.5  Perubahan Inventori .....	19
2.6  Ekspor dan Impor Barang serta Jasa .....	23
BAB III    TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA MALANG BERDASARKAN PDRB    PENGELUARAN KOTA MALANG TAHUN 2010-2014	25
.....	26
3.1  Tinjauan Agregat PDRB Kota Malang Menurut Pengeluaran	30
.....	34
3.2  Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	35
3.3  Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT .....	37
3.4  Konsumsi Akhir Pemerintah .....	38

	3.5	Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	39
	3.6	Perkembangan Perubahan Inventori .....	44
	3.7	Perkembangan Ekspor .....	
BAB IV	3.8	Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah .....	43
		PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN	44
		KOTA MALANG TAHUN 2010-2014 .....	
	4.1	PDRB (Nominal) .....	45
	4.2	Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	46
	4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	47
	4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB .....	48
	4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB .....	48
	4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor .....	49
	4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan .....	
	4.8	Neraca Perdagangan ( <i>Trade Balance</i> ) .....	51
		PENUTUP .....	54
		LAMPIRAN .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2010-2014 .....	26
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2010-2014 .....	27
Tabel 3	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2010-2014	28
Tabel 4	Pertumbuhan Menurut Pengeluaran, Malang Tahun 2011-2014 .....	29
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Malang, Tahun 2010-2014 .....	29
Tabel 6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Malang, Tahun 2010-2014 .....	30
Tabel 7	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Malang, Tahun 2010-2014 .....	32
Tabel 8	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Malang, Tahun 2010-2014 .....	33
Tabel 9	Perubahan Indeks Harga Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Malang, Tahun 2010-2014 .....	33
Tabel 10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kota Malang, Tahun 2010 – 2014 .....	34
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Malang, Tahun 2010 – 2014 .....	35
Tabel 12	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Malang, Tahun 2010 – 2014 .....	37
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Malang, Tahun 2010 – 2014	39
Tabel 14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Malang, Tahun 2010 – 2014 .....	40
Tabel 15	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Malang, Tahun 2010 – 2014 .....	41
Tabel 16	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kota Malang, Tahun 2010 – 2014 .....	43
Tabel 17	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Malang,	

	Tahun 2010 – 2014 .....	47
Tabel 18	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010 – 2014 .....	48
Tabel 19	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2010 – 2014 .....	49
Tabel 20	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Malang, Tahun 2010 – 2014 .....	50
Tabel 21	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2010 – 2014 .....	51
Tabel 22	Rasio PDRB terhadap Impor Kota Malang Tahun 2010 – 2014 .....	51
Tabel 23	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Malang, Tahun 2010 – 2014 .....	52
Tabel 24	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kota Malang Tahun 2010 – 2014	53

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang, Tahun 2010 - 2014 .....	28
----------	--	----

<https://malangkota.bps.go.id>  
<http://malangkota.bps.go.id>

## DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Malang .....	55
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang .....	56
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Malang .....	57
Tabel 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang .....	58
Tabel 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Malang .....	59
Tabel 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Malang .....	60



<https://malangkota.bps.go.id>  
<http://malangkota.bps.go.id>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## 1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

### a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17.

Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

**b. Menurut Pendekatan Pendapatan**

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

- c. Menurut Pendekatan Pengeluaran,** PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

## 1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

*https://malangkota.bps.go.id*  
*http://malangkota.bps.go.id*

**BAB II**  
**METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA**

## 2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

### i. Pendahuluan

Komponen konsumsi rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

### ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

### iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)

- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

#### iv. Penghitungan PKRT Tahunan

##### 1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

##### 2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa



komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
  - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu  $\times (30/7) \times 12 \times$  jumlah penduduk pertengahan tahun
  - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan  $\times 12 \times$  jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-adjust;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

## 2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

### i Pendahuluan

Komponen konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai komponen tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Komponen ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

## ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

## iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

#### iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

##### 1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).  
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.  
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

##### 2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

- $\bar{x}_{ij}$  : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
- $x_{ij}$  : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
- $n_i$  : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

$i$  : Jenis lembaga LNPRT,  $i = 1, 2, 3, \dots, 7$   
 $j$  : jenis pengeluaran LNPRT,  $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij} \times N_i$$

$X$  : PK-LNPRT adh Berlaku

$N_i$  : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

## 2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

### i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

### ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran

upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

### **iii. Cakupan**

Komponen konsumsi pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

### **iv. Penghitungan PDRB Tahunan**

#### **1. Sumber Data**

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)

- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

## 2. Metode Penghitungan

### a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut

<p><b>PK-P adh Berlaku =</b></p> <p>Output non pasar - penjualan barang dan jasa + output Bank Indonesia</p>
--

:

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar ), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada diwilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

### b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

## 2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

### i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

### ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

### iii Cakupan

**PMTB terdiri dari :**

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset

tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;

2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overall mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

#### **iv Penghitungan PMTB Tahunan**

##### **1. Sumber data**

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

##### **2. Metode penghitungan**

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta



tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

### **Pendekatan Langsung**

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

### **Pendekatan Tidak Langsung**

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi

pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*reflate*”(dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

*Pertama*, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkut dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

## 2.5 PERUBAHAN INVENTORI

### i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

### ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan

(*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

### iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).

- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

#### **iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan**

##### **1. Sumber data**

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

##### **2. Metode Penghitungan**

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

### **Pendekatan Langsung**

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflate perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

### **Pendekatan Tidak Langsung**

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;

- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

## 2.6 EKSPOR IMPOR

### i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan jaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

### ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

### iii Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah
  - Ekspor antar daerah
  - Impor antar daerah

#### iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

##### 1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

##### 2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.



**BAB III**

**TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA  
MALANG BERDASARKAN PDRB  
PENGELUARAN KOTA MALANG TAHUN  
2010 - 2014**

<https://malangkota.bps.go.id>  
<http://malangkota.bps.go.id>

Perubahan struktur ekonomi Kota Malang akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2010 s.d 2014, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Malang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPR, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut

### 3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA MALANG MENURUT PENGELUARAN

Setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi Indonesia dan dunia sejak tahun 2008, kondisi perekonomian Kota Malang menunjukkan tanda pemulihan. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2010-2014**

<i>Juta Rp</i>					
Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	23,413,880.45	26,255,403.88	28,816,655.57	32,111,229.47	35,055,281.93
2 Konsumsi LNPR	135,695.89	167,055.03	183,346.50	217,167.06	239,883.18
3 Konsumsi Pemerintah	1,207,845.26	1,561,373.50	1,830,615.57	2,048,947.16	2,137,821.64
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,146,431.77	11,342,831.95	12,701,672.26	13,932,632.56	15,313,005.54
5 Perubahan Inventori	970,331.91	325,644.26	250.53	4,983.59	176,751.22
6 Ekspor	10,341,743.66	12,281,138.97	17,838,121.70	24,972,354.13	31,639,035.37
7 Impor	14,838,593.29	16,965,453.22	22,623,654.32	30,467,460.96	37,998,893.91
Total PDRB	31,377,335.65	34,967,994.36	38,747,007.81	42,819,853.02	46,562,884.96

Nilai PDRB Kota Malang adh Berlaku selama periode tahun 2010 s.d 2014 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

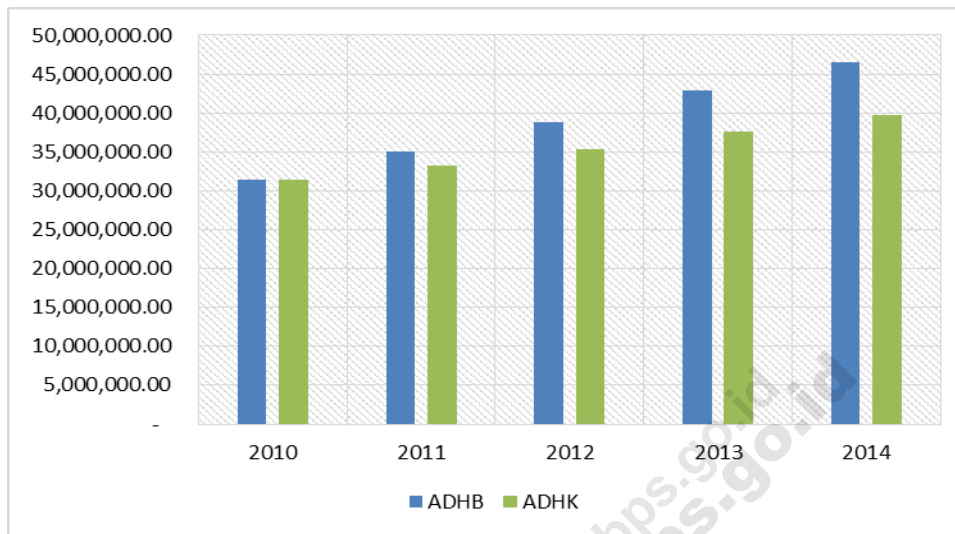
**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2010-2014**

Komponen Pengeluaran	<i>Juta Rp</i>				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	23,413,880.45	24,733,773.77	25,992,708.36	27,723,554.07	29,214,182.91
2 Konsumsi LNPRRT	135,695.89	138,048.51	143,498.69	155,707.08	175,474.30
3 Konsumsi Pemerintah	1,207,845.26	1,255,555.53	1,290,474.99	1,370,496.79	1,409,882.10
4 PMTB	10,146,431.77	10,667,434.24	11,701,388.72	12,422,204.62	13,197,366.19
5 Perubahan Inventori	970,331.91	430,163.03	208.58	3,719.11	102,119.27
6 Ekspor	10,341,743.66	11,845,508.10	15,524,908.78	19,718,981.25	22,820,307.73
7 Impor	14,838,593.29	15,796,813.34	19,297,446.20	23,852,999.36	27,193,596.98
Total PDRB	31,377,335.65	33,273,669.84	35,355,741.91	37,541,663.56	39,725,735.52

PDRB menurut pengeluaran selain dinilai atas dasar harga Berlaku juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2010–2014, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Malang berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Dari grafik di bawah, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

**Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang, Tahun 2010 - 2014**



Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor luar negeri, impor luar negeri dan net ekspor antar daerah atau ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah.

**Tabel 3. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2010 – 2014**

Komponen Pengeluaran	<i>Persen</i>				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	74.62	75.08	74.37	74.99	75.29
2 Konsumsi LNPRT	0.43	0.48	0.47	0.51	0.52
3 Konsumsi Pemerintah	3.85	4.47	4.72	4.79	4.59
4 PMTB	32.34	32.44	32.78	32.54	32.89
5 Perubahan Inventori	3.09	0.93	0.00	0.01	0.38
6 Ekspor	32.96	35.12	46.04	58.32	67.95
7 Impor	47.29	48.52	58.39	71.15	81.61
Total PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran,  
Kota Malang Tahun 2011 – 2014**

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	5.64	5.09	6.66	5.38
2 Konsumsi LNPRT	1.73	3.95	8.51	12.70
3 Konsumsi Pemerintah	3.95	2.78	6.20	2.87
4 PMTB	5.13	9.69	6.16	6.24
5 Perubahan Inventori	(55.67)	(99.95)	1,683.08	2,645.80
6 Ekspor	14.54	31.06	27.02	15.73
7 Impor	6.46	22.16	23.61	14.00
Total PDRB	6.04	6.26	6.18	5.82

Pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang dari tahun 2011 s.d 2014 secara rata-rata mencapai 6,25 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,44 persen (2011); 6,64 persen (2012); 6,08 persen (2013); dan 5,86 persen (2014). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 6,64 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar (5,86 persen).

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran  
Kota Malang, Tahun 2010 - 2014**

Komponen Pengeluaran	Persen				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	100.00	106.15	110.86	115.83	116.99
2 Konsumsi LNPRT	100.00	121.01	127.77	139.47	136.71
3 Konsumsi Pemerintah	100.00	124.36	141.86	149.50	151.63
4 PMTB	100.00	106.33	108.55	112.16	116.03
5 Perubahan Inventori	100.00	75.70	120.11	134.00	173.08
6 Ekspor	100.00	103.68	114.90	126.64	138.64
7 Impor	100.00	107.40	117.24	127.73	139.73
Total PDRB	100.00	105.09	109.59	114.06	117.21

Sementara itu, indeks implisit<sup>1</sup> PDRB menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Komponen net ekspor pada tahun 2012 menunjukkan tingkat perubahan harga yang menurun.

### 3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Malang, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Juta Rp)	31,377,335.65	34,967,994.36	38,747,007.81	42,819,853.02	46,562,884.96
b. ADHK (2010) (Juta Rp)	31,377,335.65	33,273,669.84	35,355,741.91	37,541,663.56	39,725,735.52
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	74.62	75.08	74.37	74.99	69.86
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/Tahun (Ribuan Rp)					
a. ADHB	142,345.39	157,057.17	172,771.78	189,506.95	204,813.37
b. ADHK (2010)	142,345.39	149,447.19	157,650.22	166,147.37	174,739.21
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun (Ribuan Rp)					
a. ADHB	38,253.71	42,206.85	46,429.90	50,927.33	55,040.63
b. ADHK (2010)	38,253.71	40,161.78	42,366.20	44,649.77	46,958.63
Pertumbuhan <sup>2</sup>					
a. Total Konsumsi RT	-	6.04	6.26	6.18	5.82
b. Per-RT	-	4.99	5.49	5.39	5.17
c. Perkapita	-	4.99	5.49	5.39	5.17
Jumlah RT (unit)	220,431	222,645	224,267	225,954	227,343
Jumlah Penduduk (orang)	820,243	828,491	834,527	840,803	845,973

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010 - 2014 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal maupun riil, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

<sup>1</sup> Indeks perkembangan

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2010 s.d 2014 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 75,05 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 69,89 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Pada tahun 2010, secara umum setiap rumah tangga di Kota Malang menghabiskan dana sekitar 38.253,71 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 42.206,85ribu rupiah (2011); 46.429,90ribu rupiah (2012); 50.927,33 ribu rupiah (2013); dan 55.040,63 ribu rupiah (2014).

Sementara itu, pada perkiraan *adh Konstan 2010*, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 4 sampai 5 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 5,49 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kota Malang meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 3,73 s.d 5,86 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga *adh Konstan* meningkat dari 6,04 persen ditahun 2011 menjadi sebesar 6,26 persen (2012).dan). Namun pada tahun berikutnya menurun menjadi 6,18 persen (2013) dan 5,82 persen (2014).

**Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Malang, Tahun 2010 – 2014<sup>2</sup>**

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013	2014
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	33.12	33.08	32.95	31.85	30.59
b. Pakaian dan Alas Kaki	4.11	4.22	4.30	4.22	4.06
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	11.46	11.29	11.44	11.51	11.41
d. Kesehatan dan Pendidikan	5.97	6.41	6.94	6.93	6.67
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	28.06	27.29	26.28	26.88	28.67
f. Hotel dan Restoran	12.03	12.32	12.65	13.14	13.39
g. Lainnya	5.24	5.39	5.45	5.47	5.20
Total Konsumsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Secara rata-rata dari tahun 2010 s.d 2013, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kota Malang, bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 33.12 persen (2010) ; 33,08 persen (2011) ; 32,95 persen (2012) ; 31,85 persen (2013) ; dan 30,59 persen (2014). Sementara proporsi pengeluaran bukan makanan menunjukkan bahwa konsumsi akhir rumah tangga Kota Malang yang tertinggi adalah subkomponen transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya yang berada pada kisaran 26 sampai 28 persen dari total konsumsi akhir rumah tangga.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

<sup>2</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB )



**Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Malang, Tahun 2010 – 2014**

Kelompok Konsumsi	(Persen)			
	2011	2012	2013	2014
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4.87	3.64	3.53	1.79
b. Pakaian dan Alas Kaki	6.37	4.07	5.93	6.03
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	5.91	6.92	8.87	3.50
d. Kesehatan dan Pendidikan	7.77	9.80	6.98	4.55
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	5.16	4.86	8.66	10.38
f. Hotel dan Restoran	5.58	4.18	7.22	7.31
g. Lainnya	9.58	8.70	9.12	0.60

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 4,87 persen (2011) ; 3,64 persen (2012) ; 3,53 persen (2013) dan 1,79 persen (2014). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan adanya kecenderungan terjadinya penurunan volume konsumsi makanan penduduk Kota Malang.

**Tabel 9. Perubahan Indeks Harga Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Malang, Tahun 2011 – 2014<sup>3</sup>**

Kelompok Konsumsi	(Persen)			
	2011	2012	2013	2014
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6.82	5.48	4.04	3.01
b. Pakaian dan Alas Kaki	8.16	7.45	3.17	-0.80
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	4.27	4.02	2.97	4.55
d. Kesehatan dan Pendidikan	11.59	8.21	4.05	0.49
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	3.70	0.80	4.89	5.49
f. Hotel dan Restoran	8.72	8.16	7.98	3.71
g. Lainnya	5.39	1.92	2.63	3.14

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk setiap kelompok konsumsi. Selama periode 2011 – 2014 peningkatan harga (inflasi) relatif stabil. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 6,82 persen (2011) ; 5,48 persen (2012) ; 4,04 persen (2013) dan 3,01 persen (2014). Sementara itu, konsumsi pakaian dan alas kaki dari 8,16

<sup>3</sup> Tingkat perubahan harga produk konsumsi

persen (2011) menjadi 7,45 persen (2012). Kemudian pada tahun berikutnya sebesar 3,17persen (2013) dan turun hingga sebesar minus 0,80 persen (2014).

### 3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB.

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT  
Kota Malang, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Juta Rp)	135,695.89	167,055.03	183,346.50	217,167.06	239,883.18
b. ADHK (2010) (Juta Rp)	135,695.89	138,048.51	143,498.69	155,707.08	175,474.30
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0.43	0.48	0.47	0.51	0.52

Selama periode tahun 2010 – 2014 konsumsi LNPRT baik secara adh Berlaku maupun adh Konstan 2010 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 konsumsi LNPRT adh Berlaku sebesar 135,695.89 juta rupiah kemudian meningkat menjadi 167,055.03 juta rupiah (2011), 183,346.50 juta rupiah (2012), 217,167.06 juta rupiah (2013) dan 239,883.18 juta rupiah (2014). Demikian juga dengan konsumsi LNPRT secara adh Konstan yaitu sebesar 135,695.89 juta rupiah pada tahun 2010 dan selanjutnya meningkat hingga sebesar 175,474.30 juta rupiah pada tahun 2014. Jika dilihat lebih lanjut proporsi konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) walaupun mengalami peningkatan selama periode 2010 – 2014, namun merupakan komponen yang paling kecil kontribusinya dalam penggunaan produk domestik regional bruto yaitu dibawah 1 persen.

### 3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah ditambah pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Malang serta bagaimana perkembangannya dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Malang, Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Juta Rp)	1,207,845.26	1,561,373.50	1,830,615.57	2,048,947.16	2,137,821.64
b. ADHK (2010) (Juta Rp)	1,207,845.26	1,255,555.53	1,290,474.99	1,370,496.79	1,409,882.10
Konsumsi					
(% ADHB)	3.85	4.47	4.72	4.79	4.59
Rata-rata konsumsi per-Pegawai Pemerintah/Tahun (Ribuan Rp)					
a. ADHB	118,730.49	153,361.51	185,078.92	214,886.96	219,196.31
b. ADHK (2010)	118,730.49	123,323.40	130,469.62	143,733.28	144,558.81
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Ribuan Rp)					
a. ADHB	1,472.55	1,884.60	2,193.60	2,436.89	2,527.06
b. ADHK (2010)	1,472.55	1,515.47	1,546.35	1,629.99	1,666.58
Pertumbuhan <sup>5</sup>					
a. Total Konsumsi LNPRT	-	3.95	2.78	6.20	2.87
b. Per-pegawai pemerintah	-	3.87	5.79	10.17	0.57
c. Perkapita	-	2.92	2.04	5.41	2.25
Jumlah pegawai (orang)	10,173	10,181	9,891	9,535	9,753
Jumlah Penduduk (orang)	820,243	828,491	834,527	840,803	845,973

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah secara total menunjukkan peningkatan baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 1,207,845.26 juta rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2014 nilainya mencapai 2,137,821.64 juta rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan, dari hanya 3,85persen ditahun 2010 hingga mencapai 4,59 persen pada tahun 2014. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2010; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2013 yang mencapai 4,79 persen. Peningkatan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 1.472,55 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 9).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2010) juga menunjukkan adanya fluktuasi setiap tahunnya (lihat tabel 9). Pertumbuhan konsumsi pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,20 persen. Sedangkan terendah terjadi pada tahun 2012 hanya sebesar 2,78 persen

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 131.625,94 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 9). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 9,33 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukkan peningkatan (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Hal tersebut diikuti pula dengan jumlah pegawai pemerintah yang cenderung mengalami pengurangan. Pengurangan terjadi mulai tahun 2012 yaitu dari 10.173 pegawai tahun 2010, bertambah menjadi 10.181 pegawai tahun 2011, sedangkan tahun 2012 berkurang menjadi 9.891 orang, dan semakin berkurang pada tahun 2013 yaitu tinggal 9.535 pegawai. Namun pada tahun 2014 jumlah pegawai mengalami penambahan sehingga menjadi 9.753 pegawai.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 6,20 persen; untuk konsumsi per-kapita 5,41

persen; sedangkan untuk konsumsi per-pergawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2014 yaitu 10,17 persen.

### 3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)<sup>4</sup>. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2010 – 2014 (tabel 11). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Proporsi sub komponen bangunan terhadap total PMTB relatif stabil sekitar 32–persen selama periode tahun 2010 – 2014.

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB  
Kota Malang, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Juta Rp)	10,146,431.77	11,342,831.95	12,701,672.26	13,932,632.56	15,313,005.54
b. ADHK (2010) (Juta Rp)	10,146,431.77	10,667,434.24	11,701,388.72	12,422,204.62	13,197,366.19
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	32.34	32.44	32.78	32.54	32.89
Struktur PMTB 5					
a. Bangunan (%)	87.06	85.41	85.39	85.96	86.33
b. Non Bangunan (%)	12.94	14.59	14.61	14.04	13.67
Total PMTB (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Pertumbuhan <sup>6</sup>					
a. Bangunan (%)	-	3.15	9.67	6.86	6.70
b. Non Bangunan (%)	-	18.51	9.84	2.05	3.42
Total PMTB	-	5.13	9.69	6.16	6.24

<sup>4</sup> Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Sementara jika dilihat pertumbuhannya, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2010 - 2014 meningkat dari 5.13 persen (2011) menjadi 6.24 persen (2014). Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Pertumbuhan sub komponen bangunan menunjukkan pola yang variatif antar tahunnya. Pada tahun 2011 pertumbuhan komponen bangunan sebesar 3,15 persen kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 9,67 persen. Namun pada tahun 2013 dan 2014 menurun hingga pertumbuhannya hanya mencapai 6,86 persen dan 6,70 persen. Sedangkan Non Bangunan mengalami fluktuasi pertumbuhan dari 18,51 persen tahun 2011 menurun menjadi 9,84 persen (2012) dan 2,05 persen (2013). Kemudian meningkat kembali menjadi 3,42 persen (2014).

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2010-2014 pertumbuhan PMTB mengalami fluktuasi di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai besaran angka 9,69 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu hanya sebesar 5,13 persen.

### 3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori****Kota Malang, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Juta Rp)	970,331.91	325,644.26	250.53	4,983.59	176,751.22
b. ADHK (2010) (Juta Rp)	970,331.91	430,163.03	208.58	3,719.11	102,119.27
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	3.09	0.93	0.00	0.01	0.38

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2010 perubahan inventori sebesar 97.331,91 juta rupiah, kemudian tahun 2011 perubahan inventori nilainya sebesar 325.644,26 juta rupiah. Perubahan inventori pada tahun 2012 sebesar 250,53 juta rupiah dan pada tahun berikutnya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4.983,59 juta rupiah (2013) dan 176.751,22 rupiah (2014).

### **3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI**

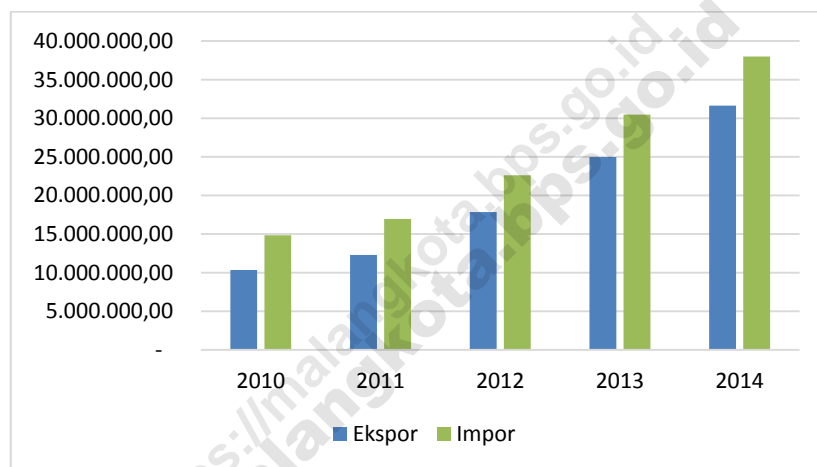
Ekspor mempunyai pengertian transaksi perdagangan keluar Kota Malang dengan negara/provinsi/kota lain. Komponen ekspor barang dan jasa dibedakan menjadi ekspor antar negara (luar negeri) dan ekspor antar daerah atau antar wilayah atau antar provinsi, baik yang dilakukan melalui darat, laut, maupun udara. Kegiatan ekspor antar negara nilainya lebih kecil jika dibandingkan dengan ekspor antar daerah.

Disamping ekspor, transaksi perdagangan yang terjadi di Kota Malang juga dapat berasal dari luar negeri maupun provinsi lain di Indonesia atau yang biasa disebut dengan impor. Seperti halnya ekspor, impor barang dan jasa dibedakan menjadi impor antar negara (luar negeri) dan impor antar daerah atau antar wilayah atau antar provinsi, baik yang dilakukan melalui darat, laut, maupun udara. Selisih antara ekspor dan impor

menghasilkan nilai ekspor neto, yang merupakan derajat ketergantungan perekonomian suatu wilayah terhadap wilayah lainnya. Jika terjadi surplus, maka pendapatan yang masuk wilayah tersebut meningkat, dan tentunya itu memperbesar PDRB wilayah bersangkutan.

Gambaran besaran ekspor dan impor Kota Malang dapat dilihat pada Gambar 1. Ekspor Kota Malang tahun 2014 mencapai Rp. 31.639.035,37 juta, sedangkan impor sebesar Rp. 37.998.893,91 juta.

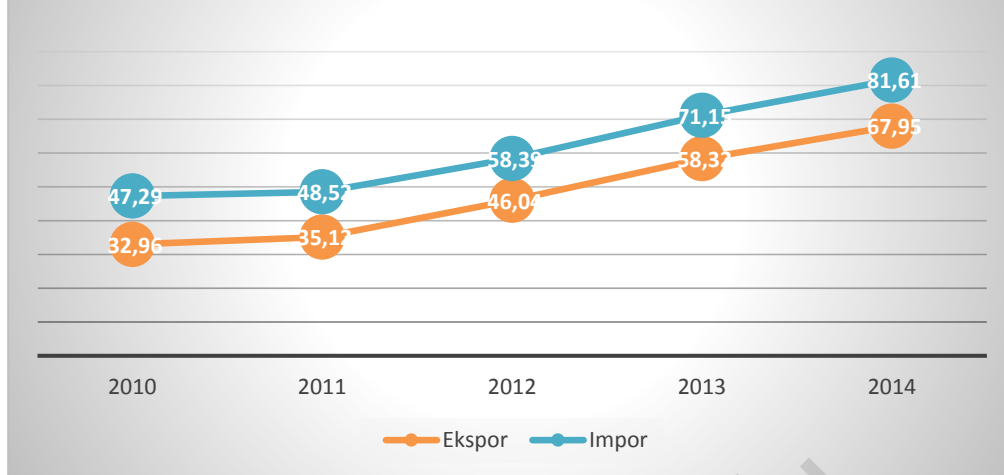
**Gambar 1.**  
**Besaran Ekspor dan Impor Barang dan Jasa Kota Malang**  
**Tahun 2010-2014**



Peranan Ekspor selama periode 2010 sampai 2014 menggambarkan kecenderungan meningkat. Tahun 2010 perannya sebesar 32,96 persen, pada tahun 2014 mencapai 67,95 persen. Demikian juga kegiatan impor gambaran perannya terhadap PDRB juga cenderung semakin meningkat. Gambaran peranan ekspor dan impor dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 1.  
Peranan Ekspor dan Impor dalam Pembentukan PDRB Penggunaan  
Tahun 2010-2014



### 3.8 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "**positif**" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat

keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

<https://malangkota.bps.go.id>  
<http://malangkota.bps.go.id>

**BAB IV**

**PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB**  
**MENURUT PENGELUARAN KOTA MALANG**  
**TAHUN 2010 - 2014**

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

#### 4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita

**Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita  
Kota Malang, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB					
a. ADHB (Juta Rp)	31,377,335.65	34,967,994.36	38,747,007.81	42,819,853.02	46,562,884.96
b. ADHK (2010) (Juta Rp)	31,377,335.65	33,273,669.84	35,355,741.91	37,541,663.56	39,725,735.52
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	38,253.71	42,206.85	46,429.90	50,927.33	55,040.63
b. ADHK (2010)	38,253.71	40,161.78	42,366.20	44,649.77	46,958.63
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010	-	4.99	5.49	5.39	5.17
Jumlah Penduduk (orang)	820,243	828,491	834,527	840,803	845,973
Pertumbuhan Penduduk	0.86	0.79	0.73	0.75	0.61

Tabel 14 menunjukkan peningkatan PDRB per-kapita Kota Malang dari tahun ke tahun yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 4-5 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 0,6 - 0,8 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

#### 4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kota Malang (sekitar 60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kota Malang sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

**Tabel 15. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	23,413,880.45	26,255,403.88	28,816,655.57	32,111,229.47	35,055,281.93
Total Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	10,341,743.66	12,281,138.97	17,838,121.70	24,972,354.13	31,639,035.37
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	2.26	2.14	1.62	1.29	1.11

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebanyak 2,26 kali dari yang diekspor. Ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Selama periode 2010 - 2014, rasio perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap ekspor menunjukkan kecenderungan menurun. Secara implisit data tersebut menjelaskan, walaupun nilai konsumsi akhir rumah tangga dan ekspor semakin meningkat namun peningkatan nilai ekspor jauh lebih cepat. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu,

penurunan rasio tersebut juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan ekspor yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

#### 4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 16. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB  
Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	23,413,880.45	26,255,403.88	28,816,655.57	32,111,229.47	35,055,281.93
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	10,146,431.77	11,342,831.95	12,701,672.26	13,932,632.56	15,313,005.54
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	2.31	2.31	2.27	2.30	2.29

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun, dari sebesar 2,31 pada tahun 2010 menjadi 2.29 pada tahun 2014. Hal ini terjadi karena nilai investasi cenderung melambat, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

#### 4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPR, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda

dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 17. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB**

**Kota Malang, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Juta Rp)					
a. Rumah Tangga	23,413,880.45	26,255,403.88	28,816,655.57	32,111,229.47	35,055,281.93
b. LNPR	135,695.89	167,055.03	183,346.50	217,167.06	239,883.18
c. Pemerintah	1,207,845.26	1,561,373.50	1,830,615.57	2,048,947.16	2,137,821.64
Jumlah	24,757,421.60	27,983,832.40	30,830,617.64	34,377,343.70	37,432,986.74
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	31,377,335.65	34,967,994.36	38,747,007.81	42,819,853.02	46,562,884.96
Proporsi	78.90	80.03	79.57	80.28	80.39

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 60 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami penurunan. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

#### 4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan modal (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang modal. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi modal (PMTB).

**Tabel 18. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	10,341,743.66	12,281,138.97	17,838,121.70	24,972,354.13	31,639,035.37
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	10,146,431.77	11,342,831.95	12,701,672.26	13,932,632.56	15,313,005.54
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	1.02	1.08	1.40	1.79	2.07

Selama tahun 2010-2014, ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB dan rasio ekspor terhadap PMTB juga mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun (tabel 18). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Peningkatan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan ekspor yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan PMTB.

#### 4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 19. Rasio PDRB terhadap Impor  
Kota Malang Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	31,377,335.65	34,967,994.36	38,747,007.81	42,819,853.02	46,562,884.96
Total Impor (ADHB) (Juta Rp)	14,838,593.29	16,965,453.22	22,623,654.32	30,467,460.96	37,998,893.91
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	2.11	2.06	1.71	1.41	1.23

Tabel 19 menunjukkan rasio PDRB terhadap impor selama tahun 2010 - 2014 cenderung menurun dari sebesar 2,11 pada tahun 2010 menjadi 2,06 pada tahun 2011. Pada tahun berikutnya rasionya terus mengalami penurunan menjadi 1,71 (2012), 1,41 (2013), dan 1,23 (2014). Penurunan rasio menunjukkan ketergantungan PDRB terhadap produk impor yang semakin meningkat.

#### 4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).



**Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan  
Kota Malang, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total Penyediaan</b>					
PDRB (ADHB)					
(Juta Rp)	31,377,335.65	34,967,994.36	38,747,007.81	42,819,853.02	46,562,884.96
%	67.89	67.33	63.14	58.43	55.06
Total Impor (ADHB)					
(Juta Rp)	14,838,593.29	16,965,453.22	22,623,654.32	30,467,460.96	37,998,893.91
%	32.11	32.67	36.86	41.57	44.94
Total Permintaan Akhir					
(Juta Rp)	46,215,928.94	51,933,447.59	61,370,662.14	73,287,313.98	84,561,778.87
%					

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan luar daerah, dengan rentang 32 s.d 44 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 68 s.d 56 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 46.215.928,94 juta rupiah (2010) menjadi sebesar 84.561.778,87 juta rupiah (2014).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 31.377.335,65 juta rupiah (2010); 34.967.994,36 juta rupiah (2011); 38.848.007,81 juta rupiah (2012); 42.819.853,02 juta rupiah (2013); dan 46.562.884,96 juta rupiah (2014). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 14.838.593,29 juta rupiah (2010); 16.965.453,22 juta rupiah (2011); 22.623.654,32 juta rupiah (2012); 30.467.460,96 juta rupiah (2013); dan 37.998.893,91 juta rupiah (2014).

#### **4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)**

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi

adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,  
Kota Malang Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	10,341,743.66	12,281,138.97	17,838,121.70	24,972,354.13	31,639,035.37
Nilai Impor (ADHB) (Juta Rp)	14,838,593.29	16,965,453.22	22,623,654.32	30,467,460.96	37,998,893.91
Net Ekspor (Juta Rp)	(4,496,849.63)	(4,684,314.25)	(4,785,532.62)	(5,495,106.83)	(6,359,858.54)
Rasio ekspor thdp Impor	0.70	0.72	0.79	0.82	0.83

Selama periode 2011 - 2014, posisi perdagangan barang dan jasa Kota Malang dengan luar negeri dan antar kota, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kota Malang cenderung dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih kecil dari impor menyebabkan adanya aliran devisa keluar, yang dalam konteks lain disebut sebagai "**hutang luar negeri**". Pada tahun 2010 posisi perdagangan barang dan jasa mengalami defisit dimana nilai impor lebih besar daripada ekspor yaitu minus 4.496.849,63 juta rupiah. Dan Tahun 2014 defisit perdagangan meningkat menjadi 6.359.858,54 juta Rp.

**BAB V**  
**PENUTUP**

<https://malangkota.bps.go.id>  
<http://malangkota.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2010 s.d 2014 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Malang pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2010 s.d 2014, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current*

*transfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Malang terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

<https://malangkota.bps.go.id>  
<http://malangkota.bps.go.id>

<https://malangkota.bps.go.id>  
<http://malangkota.bps.go.id>

## **LAMPIRAN**

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Berlaku Kota Malang Menurut Pengeluaran,					
(Juta Rupiah)					
Komponen Pengeluaran	2010*	2011*	2012*	2013*	2014*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1a. s/d 1.g.)</b>	<b>23,413,880.5</b>	<b>26,255,403.9</b>	<b>28,816,655.6</b>	<b>32,111,229.5</b>	<b>35,055,281.9</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,754,202.3	8,686,434.7	9,496,103.8	10,228,823.6	10,725,004.9
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	963,136.1	1,108,108.9	1,239,126.2	1,354,230.8	1,424,354.4
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	2,684,366.0	2,964,321.0	3,297,146.2	3,695,961.1	3,999,426.4
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1,398,544.8	1,681,966.7	1,998,458.2	2,224,597.8	2,337,273.5
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dn Budaya	6,569,624.9	7,163,998.7	7,572,204.1	8,630,635.7	10,049,938.0
1.f. Hotel dan Restoran	2,817,514.9	3,234,104.1	3,644,343.0	4,219,416.8	4,695,605.7
1.g. Lainnya	1,226,491.5	1,416,469.7	1,569,273.9	1,757,563.6	1,823,679.0
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>135,695.89</b>	<b>167,055.03</b>	<b>183,346.50</b>	<b>217,167.06</b>	<b>239,883.18</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a + 3.b)</b>	<b>1,207,845.26</b>	<b>1,561,373.50</b>	<b>1,830,615.57</b>	<b>2,048,947.16</b>	<b>2,137,821.64</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.1 + 4.b)</b>	<b>10,146,431.77</b>	<b>11,342,831.95</b>	<b>12,701,672.26</b>	<b>13,932,632.56</b>	<b>15,313,005.54</b>
4.a. Bangunan	8,833,317.82	9,800,925.81	10,973,040.95	12,008,016.49	13,249,557.40
4.b. Non-Bangunan	1,313,113.95	1,541,906.14	1,728,631.31	1,924,616.07	2,063,448.14
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>970,331.91</b>	<b>325,644.26</b>	<b>250.53</b>	<b>4,983.59</b>	<b>176,751.22</b>
<b>6. Ekspor</b>	<b>10,341,743.66</b>	<b>12,281,138.97</b>	<b>17,838,121.70</b>	<b>24,972,354.13</b>	<b>31,639,035.37</b>
<b>7. Impor</b>	<b>14,838,593.29</b>	<b>16,965,453.22</b>	<b>22,623,654.32</b>	<b>30,467,460.96</b>	<b>37,998,893.91</b>
<b>PDRB (1+2+3+4+5+6-7)</b>	<b>31,377,335.65</b>	<b>34,967,994.36</b>	<b>38,747,007.81</b>	<b>42,819,853.02</b>	<b>46,562,884.96</b>
* Angka Sementara					
** Angka sangat Sementara					

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Konstan					
Kota Malang Menurut Pengeluaran,					
					(Juta Rupiah)
Komponen Pengeluaran	2010*	2011*	2012*	2013*	2014*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1a. s/d 1.g.)</b>	<b>23,413,880.45</b>	<b>24,733,773.77</b>	<b>25,992,708.36</b>	<b>27,723,554.07</b>	<b>29,214,182.91</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,754,202.3	8,131,634.8	8,427,409.2	8,725,223.1	8,881,485.4
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	963,136.1	1,024,524.7	1,066,195.7	1,129,466.9	1,197,548.2
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	2,684,366.0	2,842,894.5	3,039,748.5	3,309,236.6	3,425,224.5
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1,398,544.8	1,507,238.0	1,654,927.0	1,770,405.6	1,851,005.4
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dn Budaya	6,569,624.9	6,908,641.4	7,244,151.9	7,871,812.0	8,689,132.2
1.f. Hotel dan Restoran	2,817,514.9	2,974,826.5	3,099,298.6	3,323,145.0	3,565,947.9
1.g. Lainnya	1,226,491.5	1,344,013.9	1,460,977.5	1,594,264.9	1,603,839.2
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPR</b>	<b>135,695.89</b>	<b>138,048.51</b>	<b>143,498.69</b>	<b>155,707.08</b>	<b>175,474.30</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a + 3.b)</b>	<b>1,207,845.26</b>	<b>1,255,555.53</b>	<b>1,290,474.99</b>	<b>1,370,496.79</b>	<b>1,409,882.10</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.1 + 4.b)</b>	<b>10,146,431.77</b>	<b>10,667,434.24</b>	<b>11,701,388.72</b>	<b>12,422,204.62</b>	<b>13,197,366.19</b>
4.a. Bangunan	8,833,317.82	9,111,221.15	9,992,044.26	10,677,770.54	11,393,279.13
4.b. Non-Bangunan	1,313,113.95	1,556,213.09	1,709,344.46	1,744,434.07	1,804,087.05
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>970,331.91</b>	<b>430,163.03</b>	<b>208.58</b>	<b>3,719.11</b>	<b>102,119.27</b>
<b>6. Ekspor</b>	<b>10,341,743.66</b>	<b>11,845,508.10</b>	<b>15,524,908.78</b>	<b>19,718,981.25</b>	<b>22,820,307.73</b>
<b>7. Impor</b>	<b>14,838,593.29</b>	<b>15,796,813.34</b>	<b>19,297,446.20</b>	<b>23,852,999.36</b>	<b>27,193,596.98</b>
<b>PDRB (1+2+3+4+5+6-7)</b>	<b>31,377,335.65</b>	<b>33,273,669.84</b>	<b>35,355,741.91</b>	<b>37,541,663.56</b>	<b>39,725,735.52</b>
* Angka Sementara					
** Angka sangat Sementara					



Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Berlaku Kota Malang Menurut Pengeluaran,					
Komponen Pengeluaran	2010*	2011*	2012*	2013*	2014*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1a. s/d 1.g.)</b>	<b>74.62</b>	<b>75.08</b>	<b>74.37</b>	<b>74.99</b>	<b>75.29</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5.4	5.5	5.5	5.4	5.2
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4.0	3.9	3.9	4.0	4.1
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	8.6	8.5	8.5	8.6	8.6
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4.5	4.8	5.2	5.2	5.0
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dn Budaya	20.9	20.5	19.5	20.2	21.6
1.f. Hotel dan Restoran	9.0	9.2	9.4	9.9	10.1
1.g. Lainnya	3.9	4.1	4.1	4.1	3.9
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>0.43</b>	<b>0.48</b>	<b>0.47</b>	<b>0.51</b>	<b>0.52</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a + 3.b )</b>	<b>3.85</b>	<b>4.47</b>	<b>4.72</b>	<b>4.79</b>	<b>4.59</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.1 + 4.b)</b>	<b>32.34</b>	<b>32.44</b>	<b>32.78</b>	<b>32.54</b>	<b>32.89</b>
4.a. Bangunan	28.15	28.03	28.32	28.04	28.46
4.b. Non-Bangunan	4.18	4.41	4.46	4.49	4.43
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>3.09</b>	<b>0.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.38</b>
<b>6. Ekspor</b>	<b>32.96</b>	<b>35.12</b>	<b>46.04</b>	<b>58.32</b>	<b>67.95</b>
<b>7. Impor</b>	<b>47.29</b>	<b>48.52</b>	<b>58.39</b>	<b>71.15</b>	<b>81.61</b>
<b>PDRB (1+2+3+4+5+6-7)</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
* Angka Sementara					
** Angka sangat Sementara					

<b>Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Konstan 2010</b>				
<b>Kota Malang Menurut Pengeluaran,</b>				
<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2011*</b>	<b>2012*</b>	<b>2013*</b>	<b>2014*</b>
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1a. s/d 1.g.)</b>	<b>5.64</b>	<b>5.09</b>	<b>6.66</b>	<b>5.38</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4.9	3.6	3.5	1.8
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	6.4	4.1	5.9	6.0
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	5.9	6.9	8.9	3.5
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7.8	9.8	7.0	4.6
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dn Budaya	5.2	4.9	8.7	10.4
1.f. Hotel dan Restoran	5.6	4.2	7.2	7.3
1.g. Lainnya	9.6	8.7	9.1	0.6
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>1.73</b>	<b>3.95</b>	<b>8.51</b>	<b>12.70</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a + 3.b )</b>	<b>3.95</b>	<b>2.78</b>	<b>6.20</b>	<b>2.87</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.1 + 4.b)</b>	<b>5.13</b>	<b>9.69</b>	<b>6.16</b>	<b>6.24</b>
4.a. Bangunan	3.15	9.67	6.86	6.70
4.b. Non-Bangunan	18.51	9.84	2.05	3.42
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>(55.67)</b>	<b>(99.95)</b>	<b>1,683.08</b>	<b>2,645.80</b>
<b>6. Ekspor</b>	<b>14.54</b>	<b>31.06</b>	<b>27.02</b>	<b>15.73</b>
<b>7. Impor</b>	<b>6.46</b>	<b>22.16</b>	<b>23.61</b>	<b>14.00</b>
<b>PDRB (1+2+3+4+5+6-7)</b>	<b>6.04</b>	<b>6.26</b>	<b>6.18</b>	<b>5.82</b>
* Angka Sementara				
** Angka sangat Sementara				

Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Atas (2010=100)				
Kota Malang Menurut Pengeluaran,				
Komponen Pengeluaran	2011*	2012*	2013*	2014*
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1a. s/d 1.g.)</b>	<b>106.15</b>	<b>110.86</b>	<b>115.83</b>	<b>119.99</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	106.8	112.7	117.2	120.8
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	108.2	116.2	119.9	118.9
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	104.3	108.5	111.7	116.8
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	111.6	120.8	125.7	126.3
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dn Budaya	103.7	104.5	109.6	115.7
1.f. Hotel dan Restoran	108.7	117.6	127.0	131.7
1.g. Lainnya	105.4	107.4	110.2	113.7
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>121.01</b>	<b>127.77</b>	<b>139.47</b>	<b>136.71</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a + 3.b)</b>	<b>124.36</b>	<b>141.86</b>	<b>149.50</b>	<b>151.63</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.1 + 4.b)</b>	<b>106.33</b>	<b>108.55</b>	<b>112.16</b>	<b>116.03</b>
4.a. Bangunan	107.57	109.82	112.46	116.29
4.b. Non-Bangunan	99.08	101.13	110.33	114.38
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>75.70</b>	<b>120.11</b>	<b>134.00</b>	<b>173.08</b>
<b>6. Ekspor</b>	<b>103.68</b>	<b>114.90</b>	<b>126.64</b>	<b>138.64</b>
<b>7. Impor</b>	<b>107.40</b>	<b>117.24</b>	<b>127.73</b>	<b>139.73</b>
<b>PDRB (1+2+3+4+5+6-7)</b>	<b>105.09</b>	<b>109.59</b>	<b>114.06</b>	<b>117.21</b>
* Angka Sementara				
** Angka sangat Sementara				

Tabel 6. Perubahan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Atas (2010=100)				
Kota Malang Menurut Pengeluaran,				
Komponen Pengeluaran	2011*	2012*	2013*	2014*
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1a. s/d 1.g.)</b>	<b>6.15</b>	<b>4.44</b>	<b>4.48</b>	<b>3.60</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6.8	5.5	4.0	3.0
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	8.2	7.5	3.2	-0.8
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	4.3	4.0	3.0	4.5
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	11.6	8.2	4.1	0.5
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dn Budaya	3.7	0.8	4.9	5.5
1.f. Hotel dan Restoran	8.7	8.2	8.0	3.7
1.g. Lainnya	5.4	1.9	2.6	3.1
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>21.01</b>	<b>5.58</b>	<b>9.16</b>	<b>(1.98)</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a + 3.b )</b>	<b>24.36</b>	<b>14.07</b>	<b>5.39</b>	<b>1.42</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.1 + 4.b)</b>	<b>6.33</b>	<b>2.09</b>	<b>3.33</b>	<b>3.45</b>
4.a. Bangunan	7.57	2.09	2.40	3.41
4.b. Non-Bangunan	(0.92)	2.07	9.10	3.67
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>(24.30)</b>	<b>58.67</b>	<b>11.56</b>	<b>29.17</b>
<b>6. Ekspor</b>	<b>3.68</b>	<b>10.82</b>	<b>10.22</b>	<b>9.48</b>
<b>7. Impor</b>	<b>7.40</b>	<b>9.16</b>	<b>8.95</b>	<b>9.40</b>
<b>PDRB (1+2+3+4+5+6-7)</b>	<b>5.09</b>	<b>4.28</b>	<b>4.08</b>	<b>2.76</b>
* Angka Sementara				
** Angka sangat Sementara				

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://malangkota.bps.go.id>  
<http://malangkota.bps.go.id>



**Badan Pusat Statistika Kota Malang**

Jl. Janti Barat 47 Malang - 65148

Telp. : (0341) 801164

Fax. : (0341) 805871

Email : [bps3573@mailhost.bps.go.id](mailto:bps3573@mailhost.bps.go.id)